KONFLIK LAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN

Amin Soimin

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Conflict Land Between The Community and Company. This study focused on land conflicts in production forests that have a license concession-IT by Ministerial Decree No. 101 / Kpts-II / 1996 dated December 26, 1996 on granting concessions to the majority group-IT Limited Production Forest (HPT) Minas Siak Riau Province area of 51 950 ha of An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper (one of the companies that joined the APRIL Group) with the community at Saber River District Siak Riau Province from 2006-2010. This study aims to analyze the causes of land conflicts in the area of production forests with HPH permits the IT community with PT. Riau Andalan Pulp and Paper at Saber River District in 2006-2010 and offers a resolution to resolve land disputes in the area of production forests with HPH permits the IT community with PT. Riau Andalan Pulp and Paper at Saber River District 2006-2010. The method used is a qualitative research method, the thought process that starts from the data collected is then taken as a general conclusion. The results of this study, it was revealed that the cause of the conflict between the public land with PT. Riau Andalan Pulp and Paper at Saber River District is the political impact of forestry in Indonesian New Order era, the lack of agreement between Secondly parties, and the public's perception and understanding of the negative against the company. Regarding Diwarkan resolution is the need to re mediation, promoting traditional values and local wisdom, balance in handling conflict.

Abstrak: Konflik Lahan antara Masyarakat dengan Perusahaan. Penelitian ini difokuskan pada konflik lahan di hutan produksi yang memiliki konsesi-IT lisensi oleh Keputusan Menteri Nomor 101 / Kpts-II/1996 tanggal 26 Desember 1996 tentang pemberian konsesi kepada kelompok-IT sebagian Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas Siak Provinsi Riau seluas 51 950 ha An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper (salah satu perusahaan yang bergabung dengan April Group) dengan masyarakat di Saber Kabupaten Provinsi Sungai Siak Riau 2006-2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik lahan di kawasan hutan produksi dengan HPH memungkinkan komunitas TI dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Saber Kabupaten Sungai di 2006-2010 dan menawarkan resolusi untuk menyelesaikan sengketa tanah di kawasan hutan produksi dengan HPH memungkinkan komunitas TI dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Saber Kabupaten Sungai 2006-2010. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, proses berpikir yang dimulai dari data yang dikumpulkan kemudian diambil sebagai hasil conclusion. The umum dari penelitian ini, terungkap bahwa penyebab konflik antara lahan publik dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Saber River District adalah dampak politik kehutanan di era Orde Baru Indonesia, kurangnya kesepakatan antara kedua pihak, dan persepsi publik dan pemahaman negatif terhadap perusahaan. Mengenai resolusi Diwarkan adalah kebutuhan untuk kembali mediasi, mempromosikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal, keseimbangan dalam penanganan konflik.

Kata Kunci: konflik, konsesi lahan, PT. RAPP

PENDAHULUAN

Pada 15 Januari 2010, Kementrian Dalam Negeri Republik Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang meneliti mengenai konflik lahan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPH-TI) antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin HPH-TI, yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau. Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dibebani izin HPH-TI. Alasannya sederhana,

karena terlalu banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap hutan, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan dan tujuannya. Pada masa lalu, konflik kehutanan seringkali ditutup-tutupi karena berbagai alasan; dan apabila terjadi konflik, pihak yang kuat selalu mengalahkan yang lemah, dan pihak lemah tidak pernah berani melawan yang kuat.¹ Namun, era reformasi telah merubah keadaan menjadi terbalik. Pihak yang lemah kini sudah berani melawan yang kuat

¹ Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R., dan Williams, S. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta.

dengan berbagai cara, dari mulai tuntutan biasa, protes, demonstrasi, sampai benturan fisik yang keras. Oleh karena itu, kita harus mulai mengakui bahwa konflik merupakan suatu persoalan penting yang harus segera ditanggulangi dalam pengelolaan hutan.

Reformasi telah membuat masyarakat sadar akan haknya, dan akhirnya berani menuntut untuk mendapatkan porsi manfaat yang wajar dari keberadaan hutan di wilayah mereka. Akibat tuntutan mereka kurang ditanggapi dengan baik dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, keberanian masyarakat lokal akhirnya diekspresikan dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap para pengelola hutan.²

Proses transformasi penguasaan sumberdaya hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal menjadi sumberdaya alam milik negara telah mengarah pada, penghilangan kelembagaan kearifan lokal, lemahnya kapasitas monitoring dan kontrol institusi negara terutama pada sumberdaya yang berskala luas, diklaim sebagai yang dikuasai oleh negara, dan pemanfaatan sumberdaya yang terjebak pada kondisi *de facto open access* dan kecenderungan para pihak berlomba memanfaatkan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan masing-masing, sehingga pemilikan dan pengelolaan oleh pemerintah diduga sebagai solusi untuk mengatasi *tragedy of the common* secara serius.³

Kebijakan pemerintah (Kementrian Kehutanan) dalam penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan produksi yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, serta pembangunan, industri dan ekspor pada umumnya melalui pembangunan hutan tanaman industri pada kawasan hutan produksi dengan memberikan izin hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPH-TI) kepada perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri untuk peningkatan volume dan nilai ekspor, serta devisa negara

merupakan kebijakan politis yang seringkali berbenturan dengan kepentingan dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Frekuensi konflik kehutanan meningkat tajam setelah tumbangnya rezim orde baru dan munculnya era reformasi, terutama pada masa transisi (tahun 2000). Peristiwa konflik kehutanan pada tahun 2000 meningkat hampir sebelas kali lipat dibandingkan dengan tahun 1997. Frekuensi konflik pada tahun 2001 dan 2002 cenderung menurun, tetapi masih dua kali lebih banyak dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 1997.⁴ Dari 359 peristiwa konflik yang tercatat pada tingkat nasional, 39% diantaranya terjadi di areal hutan tanaman industri (HTI), 27% di areal hak pengusahaan hutan (HPH), dan 34% di kawasan konservasi.

Penelitian ini fokus pada konflik lahan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin HPH-TI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/Kpts-II/1996 tanggal 26 Desember 1996 tentang pemberian izin HPH-TI pada sebagian kelompok Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau seluas 51.950 Ha An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper (salah satu perusahaan yang bergabung dengan APRIL Group) dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Propinsi Riau dari tahun 2006-2010. Untuk lebih memudahkan, hasil penelitian yang akan disajikan antara lain meliputi : (1) frekwensi konflik lahan yang terjadi, (2) lokasi dan sebaran luasan lahan yang disengketakan, dan (3) faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya konflik lahan.

Menurut pendapat Awang (2003) dalam Simangunsong (2010) mengenai konflik pengelolaan hutan disebabkan karena adanya banyak kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan (SDAH) baik kepentingan masyarakat, swasta dan pemerintah yang saling berkaitan satu sama lainnya. Pada kenyataannya masalah-masalah tersebut di atas sering terjadi di kawasan hutan produksi yang ada di Indonesia, termasuk di kawasan hutan produksi yang dibebani izin HPH-TI di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau.

² Simangunsong, M. 2010. Tesis. Kelola Konflik Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kabupaten Siak Propinsi Riau. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

³ Rustiadi E. 2005. *Sumberdaya Bersama, Kerangka Teori Dasar: Isu dan Tantangan Masa Depan di Indonesia*. IPB Bogor.

⁴ Pruitt, D.G. dan Rubin, J.Z. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Gurr (1971) menyatakan bahwa konflik adalah sumber fundamental dari inovasi dan destruksi di dalam kehidupan manusia. Bagaimana sikap inovatif terjadi didalam merespon tekanan, proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan hanya sedikit konflik yang melumpuhkan kapasitas adaptif manusia dalam proses tersebut. Konflik dapat terjadi karena deprivasi sosial yaitu kondisi kemerosotan atau kehilangan harta benda, kemiskinan, kehilangan hak-hak sosial dan politik yang dapat membawa pada kondisi kecacauan sosial. Deprivasi sosial akan muncul ketika kapabilitas nilai, ketersediaan nilai, kinerja nilai dan kesempatan-kesempatan, kapabilitas nilai kesejahteraan dan kekerasan politik, kapabilitas nilai interpersonal dan kekerasan politik dan nilai-nilai kekuasaan serta kekerasan politik tidak berlangsung secara fleksibel di kehidupan masyarakat dan negara.

Penelitian ini difokuskan pada konflik lahan di hutan produksi yang memiliki konsesi-IT lisensi oleh Keputusan Menteri Nomor 101 / Kpts-II / 1996 tanggal 26 Desember 1996 tentang pemberian konsesi kepada kelompok-IT sebagian Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas Siak Provinsi Riau seluas 51 950 ha An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper (salah satu perusahaan yang bergabung dengan April Group) dengan masyarakat di Saber Kabupaten Provinsi Sungai Siak Riau 2006-2010.

METODE

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian wawancara (*interview research*). Dari penelitian ini penulis memperoleh data mengenai sejarah objek penelitian, struktu organisasi, kegiatan objek penelitian dan data lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam melakukan penelitian penulis berusaha melakukan analisis atas semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dengan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif, teknis yang digunakan adalah dengan uraian-uraian (*deskripsi*) terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Konflik Lahan

Dampak Politik Kehutanan

Peta klasifikasi hutan negara di provinsi Riau menunjukkan bagian yang sangat kecil dari total lahan (sebagian besar merupakan daerah perkotaan) yang tidak diklasifikasikan sebagai "hutan negara." Peta ini menggambarkan secara jelas bagaimana mata pencaharian masyarakat lokal menjadi terjepit. Sebagian besar provinsi ini, sebagai hutan negara, berada di bawah kekuasaan negara. Walaupun kini, Soeharto turun dari jabatannya melalui gerakan rakyat yang dimotori para aktivis mahasiswa, masyarakat dan lingkungan negara Indonesia sampai dengan masa pemerintahan sekarang masih tetap menderita konsekuensi dari buruknya pemerintahan dan penegakan hukum mengenai hutan negara dan kebijakan keuangan pada masa lalu. Kebijakan kehutanan masa lalu yang buruk ini persis berdampak di Kecamatan Sungai Mandau, yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. RAPP atas lahan konsesi yang sampai saat ini masih berlanjut.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang TGHK Provinsi Riau, Kawasan Hutan Sebang, Melibur dan Minas I dan sekitarnya di wilayah kecamatan Sungai Mandau dan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah ditetapkan sebagai Hutan Produksi Tetap jelas merupakan produk hukum kehutanan yang diciptakan oleh rezim Soeharto. Bahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 734/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 kemudian sesuai SK. Menhut No. 137/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 telah memberikan Hak Pengusahaan utan Tanaman Industri kepada PT. Arara Abadi seluas ± 98.641,8 Ha dan PT. RAPP seluas ± 25.045,7 Ha yang berada di Kecamatan Sungai Mandau dan Tualang makin menambah penderitaan masyarakat.

Saling Klaim

Permasalahan yang muncul setelah Keputusan Menteri Kehutanan No. 734/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 kemudian sesuai SK. Menhut No. 137/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997

telah memberikan Hak Pengusahaan utan Tanaman Industri kepada PT. Arara Abadi seluas $\pm$ 98.641,8 Ha dan PT. RAPP seluas $\pm$ 25.045,7 Ha adalah di kawasan tersebut ternyata terdapat lahan perkampungan, pemukiman, perkebunan atau diduduki dan digarap oleh masyarakat. Permasalahan ini terus berlarut-larut hingga saat ini tanpa ada solusi yang nyata.

Saling klaim terjadi antara dua belah pihak ini mengenai kepemilikan lahan. Namun jika dilihat dari sisi sejarah, desa-desa yang diidentifikasi masuk dalam HPHTI tersebut sebenarnya sudah ada sebelum izin HPHTI diterbitkan. Ini dibuktikan berdasarkan peta *Graadafdelingsbad van Sumatra's Oostkurt No. 21/XVI* dated 1932 skala 1: 100.000 yang dibuat Pemerintah Belanda. Desa-desa dalam kawasan hutan seluruhnya sudah definitif dan setiap pemukiman telah tersedia dan dibangun sarana dan prasarana milik pemerintah seperti jalan, jembatan, Sekolah, Puskesmas, Kantor Kepala Desa, Mesjid, MCK dan sarana kepentingan umum lainnya.

Resolusi Konflik Masyarakat

Sejak konflik ini mulai bergulir, sebenarnya sudah terdapat beberapa kali rapat mediasi dilakukan antara kedua belah pihak, namun sampai sejauh ini belum ditemukan suatu kesepakatan yang dapat diterima secara bersama. Beberapa solusi tercatat sudah diupayakan untuk menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan produksi yang dibebani izin HPH-TI antara masyarakat dengan PT. Riau Andalan *Pulp and Paper* di Kecamatan Sungai Mandau dilakukan, namun belum ada tanda-tanda kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Segala upaya yang dilakukan seperti yang digambarkan di atas, belum dapat menyelesaikan sengketa lahan hingga hari ini. Untuk itu diperlukan resolusi konflik agar permasalahan lahan ini dapat diselesaikan.

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu

fenomena politik, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Perluasan lahan kebun untuk keperluan ketahanan pangan dan penggelontoran modal pasca melemahnya investasi kehutanan telah berdampak kepada hilangnya hak dan ruang kelola rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Ketika konflik terjadi masing-masing pihak cenderung mengambil langkah-langkah sendiri dan tidak pernah mengacu kepada langkah-langkah standar penyelesaian konflik hasil dari kesepakatan bersama.

Perlunya Mediasi Ulang

Mediasi sebetulnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat awam, termasuk dalam menyelesaikan konflik lahan konsesi antara masyarakat dengan PT. RAPP. Jika mediasi persamaannya adalah musyawarah, maka sudah sejak lama masyarakat menggunakannya sebagai ruang dalam penyelesaian sengketa dan konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mediasi atau musyawarah seperti kehilangan pamornya, ketika model-model penyelesaian sengketa dan konflik lebih banyak menggunakan ruang-ruang pengadilan dan ruang formal lainnya.

Dan ketika saat ini mediasi kembali dipromosikan menjadi ruang-ruang penyelesaian konflik kembali, terutama dalam penyelesaian konflik penguasaan sumber daya alam, memang sempat terjadi kegagalan di tingkat masyarakat, Misal-

nya adanya keraguan mengenai payung hukum atas kesepakatan yang dihasilkan oleh mediasi, dan kekuatan mediasi dalam memaksa semua pihak untuk taat dalam menjalankan hasil kesepakatan tersebut. Tak hanya kegagalan ditingkat masyarakat, tapi juga kegagalan yang sama dialami oleh pemerintah, dan bahkan pun dialami oleh perusahaan sebagai salah satu pihak penting dalam konflik.

Tidak mudah memang mempromosikan sesuatu dalam hal ini. Mediasi sebagai jalan penyelesaian konflik dan mendorong perdamaian, karena selama ini belum ada contoh yang kongkrit yang bisa dilihat. Tidak heran jika kemudian mediasi yang digagas untuk memediasi konflik lahan antara warga di Kecamatan Sungai Mandai dengan PT. RAPP, mengalami maju mundur. Tidak jarang mengalami stagnan dan bahkan kebuntuan, yang kadang berdampak pada turun naiknya semangat dan kepercayaan para pihak pada proses mediasi.

Mengutamakan Kearifan Lokal

Sengketa tanah seperti antara Masyarakat dengan PT. RAPP di Kecamatan Sungai Mandau merupakan salah satu sengketa yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terutama pemerintah. Berbagai upaya penyelesaian sengketa tanah melalui badan peradilan negara telah ditempuh tetapi belum tentu menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi. Walaupun sengketa yang ada telah dinyatakan selesai di pengadilan tetapi masih ada konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun berasal dari daerah lokal tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal yang dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai - nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya sehingga walaupun pemahaman modern selalu mengandalkan hukum formal dan menganggap kearifan lokal hanya alternatif tetapi

sebagian besar masyarakat desa menggunakan kerifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud di sini adalah mediasi sebagai suatu cara yang utama dan efektif sebagai langkah penyelesaian sengketa tanah konsesi yang terjadi antara masyarakat di Kecamatan Sungai Mandau dengan PT. RAPP.

Adanya Keseimbangan Kepentingan

Dari sisi pembangunan ekonomi, konflik agraria yang terjadi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar dari setiap konfliknya. Masyarakat yang terusir bisa melampirkan kemarahannya dengan merusak investasi yang telah ditanamkan pemilik modal seperti pabrik, atau dalam bentuk protes yang paling damai seperti mogok atau penutupan akses jalan pun perusahaan penanam modal tentunya sudah dirugikan secara ekonomi. Tidak hanya bagi penanam modal, bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah itu sendiri, konflik agraria berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Konflik yang berkepanjangan juga menimbulkan masalah sosial yang kian lama akan kian sulit untuk dicarikan solusinya. Dalam penanganan konflik yang terpenting adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada.

Jika mengacu sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tujuan utama dari pengelolaan sumber daya alam adalah, “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” yang mekanismenya dilakukan melalui penguasaan dan pengaturan oleh negara. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang muncul dalam pengelolaan pertanahan merupakan sebuah keharusan untuk mencapai tujuan ideal pengelolaan sumber daya alam di atas, memberi penghidupan, tidak membawa kerusakan dan melindungi keragaman struktur sosial dan budaya masyarakat, terutama di Kecamatan Sungai Mandau.

SIMPULAN

Pada masa pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto selama 32 tahun, penguasaan hutan merupakan alat dan sekaligus hadiah bagi kekuasaan negara. Berbagai hutan yang lebat po-

honnnya dibagikan sebagai hadiah dalam bentuk konsesi HPH, HTI dan perkebunan untuk keluarga, teman, dan rekan kerja Soeharto, dan juga untuk para anggota kunci militer dan elit politik dalam rangka menjamin kesetiaan mereka. Maka tak pelak, pihak yang menguasai hutan memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap derap perpolitikan dan perekonomian di Indonesia. Persepsi dan pemahaman masyarakat desa terhadap perusahaan pengelola hutan tanaman industri kurang baik dan cenderung negatif, seolah-olah pemerintah pusat maupun daerah hanya mementingkan kepentingan perusahaan, sedangkan hak-hak atas pemukiman dan lahan mereka diabaikan.

Permasalahan seperti di atas itulah yang sampai sejauh ini belum ada titik temu untuk mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak, memang sudah ada beberapa upaya penyelesaian sengketa ini. Resolusi Konflik masyarakat dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Kecamatan Sungai Mandau adalah: perlunya Mediasi Ulang. Mediasi sebetulnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat awam, termasuk dalam menyelesaikan konflik lahan konsesi antara masyarakat dengan PT. RAPP. Jika mediasi persamaannya adalah musyawarah, maka sudah sejak lama masyarakat menggunakannya sebagai ruang dalam penyelesaian sengketa dan konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mediasi atau musyawaah seperti kehilangan pamornya, ketika model-model penyelesaian sengketa dan konflik lebih banyak menggunakan ruang-ruang pengadilan dan ruang formal lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Awang, S.A., 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Debut Wahana Sinergi

-----, 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Wahana Sinergi

Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Bloomfield, D., Ghai, Y., dan Reilly, B. 2000. *Menganalisis Konflik yang Mengakar*. Jakarta: The British Council

Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R., dan Williams, S. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council

Ishak, 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku

Mitchell, B., Setiawan, B., dan Rahmi, D.H. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Miles, H.B., dan Huberman, A.M., 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Tjetjeb Rohendi Rohidi, Penerjemah: *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Maleong. L.J., 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Rustiadi E. 2005. *Sumberdaya Bersama, Kerangka Teori Dasar: Isu dan Tantangan Masa Depan di Indonesia*. IPB Bogor.

Saaty, T.L., 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. LPPM. Jakarta.

Simangunsong, M, 2010. Tesis. *Kelola Konflik Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kabupaten Siak Propinsi Riau*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Usman, S. 2001. *Konflik dan Resolusi Konflik Sumberdaya Alam Perspektif Sosiologi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: UGM.

Wardani, A. 2006. Tesis. *Konflik Sumber Daya Hutan : Studi Kasus Konflik Taman Hutan Raya Sultan Adam di Desa Mandiangin Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: UGM. Tidak Diterbitkan.